

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Bahkan pendidikan sudah mewarnai perjalanan hidup manusia sejak manusia itu dilahirkan, sampai dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau tidaknya pribadi manusia dalam kehidupan ini menurut ukuran normatif. Di sisi lain, pendidikan merupakan proses pemanusiaan menuju lahirnya insan bernilai secara kemanusiaan.¹

Begitu besarnya pengaruh pendidikan terhadap pembentukan karakter manusia, sehingga pemerintah sangat serius memperhatikan dan menangani pendidikan sebagai pilar utama dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa yang paripurna dalam konteks kemanusiaan, diharapkan mampu menyesuaikan diri dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

Bentuk keseriusan pemerintah terhadap dunia pendidikan, dirumuskannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pedoman dan payung hukum dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa; pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar

¹Danim Sudarwan, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 4.

²*Ibid*, h.57.

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.³

Selanjutnya, Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 dan Bab II pasal 3 menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴ Nasional di atas, dapat di pahami bahwa pendidikan nasional memiliki tujuan yang luhur dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Lebih lanjut, Dewey mengemukakan bahawa tujuan pendidikan, ialah untuk membentuk manusia menjadi warga negara yang baik, untuk itu, di sekolah-sekolah diajarkan berbagai keterampilan kepada anak agar mampu menyongsong kehidupannya dalam masyarakat, menjadi anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang baik.⁵ Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, tentunya melalui proses yang sistematis serta terarah, salah satunya adalah melalui proses pendidikan secara berkelanjutan,

³Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara, 2009, h. 2.

⁴Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*, Bandung: Citra Umbara, 2009, h. 64.

⁵Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, h.24.

terintegrasi dan holistik. Pendidikan dimaksud bukan hanya pada jenjang formal, tetapi dapat pula direalisasikan pada semua jenjang pendidikan baik pendidikan formal, nonformal maupun informal. sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pada Bab I pasal 1 ayat 10 bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.⁶

Di dalam proses pendidikan, pencapaian tujuan akhir sebuah pendidikan merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan dengan melibatkan beberapa komponen secara integral, komponen lembaga, pengelola komponen pendidikan tersebut antara lain kepala sekolah dan guru, masyarakat, maupun sarana dan prasarana. Kepala sekolah merupakan pemimpin atas manajemen suatu organisasi sekolah. Melalui tugas-tugas kepemimpinan yang harus dilakukan oleh karena itu kepala sekolah harus memberi kepemimpinan kepada guru dalam menjalankan kegiatan pengajaran selain kegiatan manajemen kepala sekolah harus dinamis, mampu menjadi inisiator, dinamisator yang baik, sehingga tercipta suasana sekolah mendorong guru peserta didik, tenaga administrasi mencapai prestasi yang tinggi.⁷

Kepala sekolah sebagai *top leader* merupakan salah satu komponen terpenting yang menentukan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Oleh

⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara, 2009, h. 9.

⁷E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, h. 39.

karena itu, menurut Supriadi dalam Mulyasa dikemukakan bahwa erat hubungannya antara mutu kepala sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim budaya sekolah, dan menurunnya perilaku nakal peserta didik.⁸

Sebagai kepala sekolah, tugas utamanya tidak hanya berperan sebagai pemimpin atau manajer, tetapi dapat berperan dalam segala dimensi kehidupan sekolah. Oleh karena itu, menurut Mulyasa, minimal ada tujuh peran yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah yaitu; *educator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator* dan *motivator* (EMASLIM).⁹

Menurut Hussein Mahmod, berdasarkan kajian sekolah efektif peran kepala sekolah sering dibicarakan sebagai faktor yang menyebabkan keberhasilan sebuah sekolah. kepala sekolah perlu memainkan perannya dengan efektif dan efisien supaya sekolah akan terus cemerlang dan berkualitas.¹⁰

Sistem pendidikan di Indonesia, kedudukan dan kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan tidak dijabarkan dengan jelas, sehingga sekolah tidak memiliki pedoman orientasi penyelenggaraan pendidikannya, bahkan hampir semua sekolah, penyelenggaraan pendidikan hanya diorientasikan kepada Nilai Evaluasi Akhir. Di Indonesia perihal penjaminan mutu pendidikan diatur oleh peraturan pemerintah No.19 tahun 2005, pasal 91 yaitu (1) setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, (2) penjaminan mutu pendidikan

⁸E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah...*, h. 24.

⁹*Ibid*, h. 98.

¹⁰*Ibid*, h. 45.

dimaksud pada ayat satu bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, (3) penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.¹¹

Di dalam, UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 45 ayat 1 berbunyi, setiap satuan pendidikan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.¹²

Upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah ayat (2) dewan pendidikan, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Ayat (3) komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan, memberikan pertimbangan, arahan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.¹³

Implementasi Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain

¹¹Nanang Fattah, *Sistem Penjamin Mutu Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, h.5.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara, 2009, h. 10

¹³*Ibid*, h.73.

peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 peraturan pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar Nasional Pendidikan yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Panti Asuhan Budi Mulya merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal yang ada di Kota Palangka Raya. Panti Asuhan Budi Mulya berdiri sejak tahun 1971 Sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak terlantar yang ada di kota Palangka Raya serta di daerah-daerah terpencil. Dibentuknya lembaga pendidikan non formal berupa Panti Asuhan ini ialah tujuan yang baik yakni turut mencerdaskan bangsa, melalui pembinaan pendidikan serta penampungan anak yatim, piatu, anak terlantar, pemuda putus sekolah, keluarga miskin, dan lain sebagainya yang membutuhkan bantuan.¹⁴

Tahun 2007 Panti Asuhan Budi Mulya bekerja sama dengan SMK Sambelum kepala sekolah bernama Ibu Fera SP, kerja sama ini terjadi karena kepala sekolah Sambelum dengan alamat sekolah di jalan Tilung 6 tidak memiliki murid kemudian berusaha kerja sama dengan Panti Asuhan Budi Mulya karena di Panti Asuhan Budi Mulya saat itu baru ada sekolah MTs Fathul Jannah sehingga anak yang sekolah SMA harus sekolah di luar Panti pada saat itu anak-anak sekolah di SMA-NU Palangka Raya, dengan latar

¹⁴Sulaiman Nawawi, *Profil Panti Asuhan Budi Mulya Palangka Raya Tahun 2015*, h. 5.

belakang ini kemudian SMK Sambelum bekerja sama dengan Panti Asuhan Budi Mulya, hingga tahun 2010. Namun Sejak tahun 2010 Panti Asuhan Budi Mulya resmi mendirikan pendidikan formal yaitu sekolah menengah kejuruan SMK Budi Mulya. Hal ini karena kepala Panti Asuhan Budi Mulya yang di Pimpin oleh Pak. H.Sulaiman Nawawi ingin mendirikan sekolah sendiri dengan tujuan agar lebih mudah mengembangkan dan memimpinya. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa anak yang tinggal di Panti Asuhan Budi Mulya melanjutkan pendidikan di SMK Budi Mulya. Sekolah tersebut merupakan salah satu pendidikan yang ada di kota palangka Raya dengan kompetensi keahlian Agribisnis¹⁵ Tanaman Pangan¹⁶ dan Hortikultura.¹⁷ hal ini sangat sesuai dengan letak georgrafis propinsi kalimantan yang merupakan daratan tropis yang sangat mendukung dengan areal untuk bercocok tanam baik berupa tanaman pangan, palawija, maupun tumbuhan industri. kompetensi ini sangat penting bagi semua siswa yang belajar di SMK Budi Mulya sebagai bekal hidup di masa yang akan datang,

¹⁵Agribisnis sebagai ilmu adalah merujuk pada rangkaian ilmu pengambilan keputusan, yaitu ilmu bisnis (ekonomi manajerial), manajemen, ilmu sistem, ilmu komunikasi dan ilmu penunjang lain yang diterapkan untuk menggerakkan usaha produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan supaya bisa diterima oleh konsumen yang dituju.<http://agribisnis.umm.ac.id/id/umm-news-2489-bidang-ilmu-agribisnis-apa-itu-agribisnis-.html> : on line 30 April 2015 Jam 10:15 WIB.

¹⁶Tanaman Pangan diartikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Pangan diperuntukkan bagi onsumsi manusia sebagai makanan atau minuman, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. <http://distantph.kalselprov.go.id/2014/02/03/mengenal-tanaman-pangan/Distan TPH KalSel>: on line 30 April 2015 Jam 10:20 WIB.

¹⁷Hortikultura merupakan cabang dari agronomi. Berbeda dengan agronomi, hortikultura memfokuskan pada budidaya tanaman buah (pomologi/frutikultur), tanaman bunga (florikultura), tanaman sayuran (olerikultura), tanaman obat-obatan (biofarmaka), dan taman (lansekap). Salah satu ciri khas produk hortikultura adalah perisabel atau mudah rusak karena segar. <http://id.wikipedia.org/wiki/Hortikultura>: on line 30 April 2015 Jam 10:30 WIB.

sehingga menjadi bagian masyarakat yang produktif dan mandiri. serta menjadi pelopor bagi masyarakat untuk bercocok tanam khususnya pada bagian tanaman pangan.

Berdasarkan hasil observasi pada tahun 2015.¹⁸ diketahui bahwa siswa-siswi yang berada di SMK Budi Mulya banyak terjadi kendala dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, baik dalam penyampaian materi yang berkaitan dengan kompetensi kejuruan terutama materi tentang tanaman pangan dan hortikultura. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai media praktek bercocok tanam masih belum tersedia baik secara fisik maupun non fisik. Kondisi ini masih terjadi sampai saat ini. Sejak tahun 2010 belum mendapat perhatian yang serius dari kepala sekolah sebagai pemimpin yang berkewajiban untuk melaksanakan perubahan pada lembaga pendidikan yang di pimpinya sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. berdasarkan kedudukannya, lulusan pendidikan menengah SLTA atau Kejuruan sedianya selain mereka menjadi pekerja yang baik, akibat ia telah malampui kemampuan operasi mental, berpikir logik, maka mereka diharapkan juga dapat memikirkan bagaimana sebaiknya sesuatu pekerjaan dikerjakan dan diselesaikan.¹⁹ Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.²⁰

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses

¹⁸Observasi di SMK Budi Mulya Palangka Raya 20 Februari 2015

¹⁹Djohar, *Pendidikan Strategik*, Yogyakarta: LESFI, 2003, h. 29.

²⁰Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h.73.

belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang di maksud dengan prasarana pendidikan ialah fasilitas yang secara maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan baik didalam ruangan maupun di ruang sekolah, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga. komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.²¹ setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik.²² dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 2015 tentang standar standar sarana prasarana bab VII pasal 42 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.²³

²¹Muhammad Rohman, *Manajemen Pendidikan Analisis dan Solusi Terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran Yang Efektif*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, h.267.

²²Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h.118.

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan. h. 32

Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia, tentu berpengaruh dalam menunjang keberhasilan dari tujuan pendidikan yang telah ditentukan, yaitu mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Mengaju pada latar belakang masalah tersebut, maka untuk mengetahui bagaimana peran serta usaha kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Budi Mulya, karenanya menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut guna memberikan solusi pendidikan yang dihadapi oleh SMK Budi Mulya dengan judul, peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di bidang sarana dan prasarana pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*) pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.²⁴

Penelitian ini, penentuan fokus penelitian berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman serta referensi. Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya. Sedangkan subfokus pada penelitian ini adalah peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan di bidang sarana dan prasarana pendidikan

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2010, h. 32.

sebagaimana tercantum dalam Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XII Pasal 45 ayat 1 tentang sarana dan prasarana.²⁵ serta Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 Bab VII pasal 42 ayat 2 yang berkaitan dengan Standar sarana dan prasaran.²⁶

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peran kepemimpinan kepala sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam usaha meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam mengatasi kendala untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan pada penelitian ini yang berkaitan dengan peran kepemimpinan kepala sekolah dalam Meningkatkan Mutu sarana dan prasarana Pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya, yaitu sebagai berikut:

²⁵Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h.118.

²⁶Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h.84.

1. Untuk mendiskripsikan Peran Kepemimpina Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana Pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya;
2. Untuk mendiskripsikan bagaimana kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam usaha meningkatkan mutu sarana dan prasarana Pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya;
3. Untuk mendiskripsikan bagaimana usaha yang dilakukan kepala sekolah untuk menghadapi kendala dalam upaya meningkatkan mutu sarana dan prasarana Pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini setelah selesai nanti adalah:

1. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan literatur tentang peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sarana dan prasana pendidikan di sekolah.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi sekolah SMK Budi Mulya, peneliti ingin mengungkapkan tentang peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, sehingga yang berkepentingan bisa mengambil manfaatnya dengan mengacu pada hasil penelitian ini, dan pada penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada penambahan kekayaan literatur tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

- b) Bagi penyelenggara pendidikan, sebagai bahan masukan bagi dinas/Instansi terkait dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta mengevaluasi kebijakan kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan serta meningkatkan kualitas mutu pendidikan sekolah.
- c) Bagi guru, diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional, dalam menggunakan dan menyediakan sarana pendukung pada saat proses kegiatan belajar mengajar.